

Surat kabar : Kompas
Subyek : Illegal Logging

Edisi : 14 Oktober 2008
Hal : 23

Polisi Selidiki Ribuan Kayu Bulat di Kutai Barat Pemerintah Kota Bima Pulihkan Hutan yang Dikapling

Samarinda, Kompas - Tim penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyelidiki keabsahan 7.240 batang atau 14.838 meter kubik kayu bulat yang ditemukan di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Diduga, kayu tersebut merupakan hasil tebangan tiga perusahaan.

"Polisi masih memeriksa kelengkapan dokumen kayu," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar I Wayan Tjatra di Balikpapan, Senin (13/10).

Polisi menyita ribuan batang kayu setelah mendapat laporan masyarakat yang mencurigai kegiatan pengangkutan dan penumpukan kayu itu tidak berizin.

Berdasarkan keterangan masyarakat, kayu-kayu itu hasil tebangan tiga perusahaan, yakni PT Keruing Lestari sebanyak 9.822 m³, PT Harapan Kaltim Mandiri sebanyak 4.514 m³, dan PT Harapan Rimba Raya ada 502 m³. Tjatra mengakui belum ada perusahaan yang dimintai keterangan.

Direktur Reserse Kriminal Polda Kaltim Komisaris Besar Arief Wicaksono menyatakan, polisi menyita kayu gelondongan itu karena sebagian dari kayu itu adalah kayu ulin. "Penebangan kayu ulin harus memiliki izin khusus serta dilarang diperdagangkan ke luar Kalimantan. Status kayu masih dalam penyelidikan," katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Budi Pranowo menyatakan, pihaknya siap membantu penyelidikan polisi.

Hutan dikapling

Sementara itu, hutan di Kota Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang ditanami kayu jati kini gundul ditebangi oleh masyarakat. Sebanyak 371 penduduk lantas mengklaim kawasan itu sebagai hak milik diperkuat dengan 600 lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT).

Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Bima HM Nur Latief pada acara pembukaan rapat koordinasi jajaran Pemerintah Kota Bima dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB yang dihadiri Gubernur NTB KHM Zainul Majdi, Senin (13/10) di Bima.

Nur Latief mengaku tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengeluarkan SPPT.

Seusai acara, Nur Latief menuturkan, Kota Bima seluas 372 km² dikelilingi hutan Kapenta (1.900 hektar/ha), Kolo (500 ha), Tolowari (300 ha), Ndano Nae (600 ha), Taloka (400 ha), Londa (150 ha), dan Lelamase (300 ha). Sebelum menjadi pemerintahan otonom tahun 2003, Kota Bima yang berpenduduk 123.000 jiwa, meliputi 38 kelurahan dan lima kecamatan, masuk wilayah Kabupaten Bima.

Lahan bekas hutan itu kini ditanami warga dengan padi, kedelai, dan palawija lain. Para pemegang SPPT kemudian menyerahkan kontribusi ke Pemkab Bima. Akibat penggundulan hutan, tahun 2002, Kota Bima dilanda banjir besar dan menelan korban manusia.

Karena itu, sejak tahun 2003 Pemkot Bima mencabut SPPT diikuti penyediaan dana bergulir sebesar Rp 370 juta. Tiap kelompok masyarakat mendapat Rp 25 juta untuk usaha. Mereka diwajibkan menanami kawasan tersebut dengan bibit pohon, seperti jati, mahoni, sonokeling, mangga, asam, dan kemiri, yang disediakan oleh pemerintah. (BRO/RUL)